

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata menjadi satu dari sebagian sektor strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sektor ini juga menyimpan peran penting dalam membawa lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan mendorong pelestarian budaya serta lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024). Satu dari sebagian bentuk pengembangan pariwisata yang berkembang saat ini adalah desa wisata, yaitu desa yang menawarkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal seperti alam, budaya, dan tradisi masyarakat. Desa wisata menjadi wujud nyata dari pembangunan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata (Nugroho D. S., 2018)

Di antara berbagai bentuk desa wisata, desa wisata berbasis religi memiliki karakteristik khas karena menggabungkan nilai spiritual dan budaya dalam pengalaman wisata. Satu dari sebagian contoh desa wisata religi yang berkembang adalah Desa Nyatnyono, yang berposisi di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini dikenal sebagai tujuan wisata ziarah, dengan daya tarik utama berupa makam Waliyullah Ki Ageng Nyatnyono. Destinasi tersebut banyak didatangi peziarah dari berbagai daerah yang pada tahun 2022 telah dikunjungi oleh 230.962 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022). Potensi wisata religi ini diperkuat dengan suasana alam yang asri, udara

pegunungan yang sejuk, dan budaya masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai keagamaan.

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung Tempat Rekreasi di Kabupaten Semarang

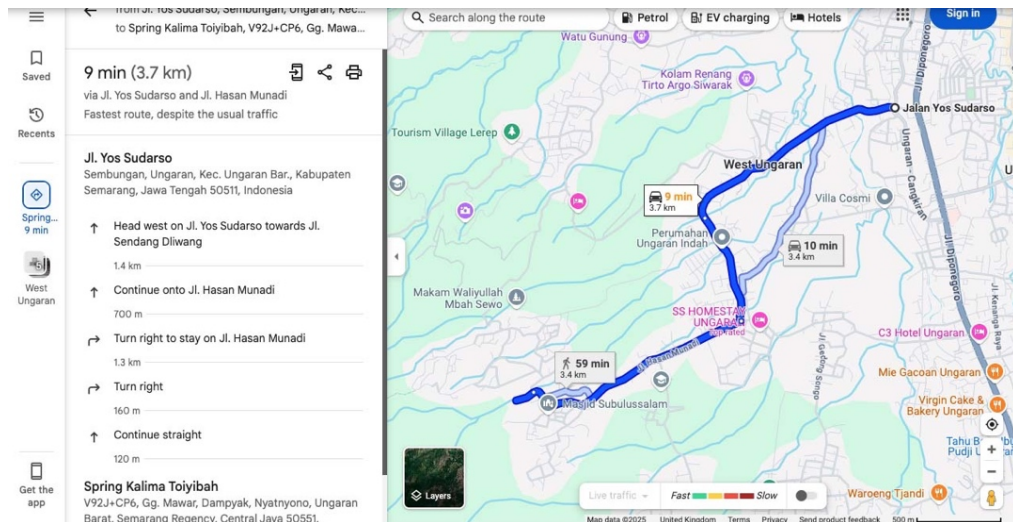
Tempat Rekreasi		Jumlah Pengunjung		
		Domestik	Asing	Total
WISATA ALAM				
1	Air Terjun Curug Lawe	19,314	-	19,314
2	Air Terjun Semirang	17,792	-	17,792
3	Curug Tujuh Bidadari	-	-	-
4	Klenting Kuning	1,660	-	1,660
5	Lereng Kelir	-	-	-
6	Muncul River Tubing	10,947	-	10,947
7	Vana Prastha Gedong Songo	7,837	-	7,837
8	Wana Wisata Penggaron	-	-	-
9	Pendakian Thekelan	17,633	-	17,633
10	10. Wisata Alam Perantunan	5,304	12	5,316
WISATA BUDAYA				
1	Candi Gedongsongo	425,738	529	426,267
2	Goa Maria Kerep Ambarawa	107,873	-	107,873
3	Makam Hasan Munadi Nyatnyono	230,9	-	230,962
4	Museum Kereta Api Ambarawa	162,408	331	162,739
5	Palagan Ambarawa	28,847	-	28,847

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2022)

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang menghambat pengembangan Desa Wisata Religi Nyatnyono secara optimal. Masalah utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya kendaraan umum yang terkoneksi langsung ke lokasi desa wisata. Ketiadaan transportasi umum berdampak pada rendahnya aksesibilitas, sehingga menyulitkan wisatawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk berkunjung. Aksesibilitas merupakan satu dari sebagian unsur penting dalam daya saing destinasi wisata, dan keberadaan

transportasi publik yang memadai menjadi syarat utama untuk menarik kunjungan wisatawan (Pitana, 2009).

Gambar 1.2 Jarak Titik Transportasi Umum Terdekat dengan Lokasi wisata



Sumber : (Google Maps, 2025)

Tidak adanya jalur angkutan umum yang langsung ke Nyatnyono menyebabkan wisatawan harus memakai kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan dari pusat kota. Hal ini tidak hanya membatasi jumlah kunjungan, tetapi juga mengurangi kenyamanan wisatawan, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Permasalahan ini menuntut perhatian dari pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola potensi lokal serta menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang searah dengan kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014). Maka itu, peran pemerintah desa sangat krusial dalam menciptakan solusi atas masalah akses transportasi dan ketersediaan penginapan.

Menurut Syafri (2002), peran pemerintah mencakup empat fungsi utama: fungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam fungsi pelayanan, pemerintah desa diharapkan dapat menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan wisatawan, seperti akses jalan, transportasi umum, dan akomodasi. Dalam fungsi pengaturan, pemerintah menyusun aturan dan kebijakan lokal yang mendukung pengelolaan wisata secara tertib dan berkelanjutan. Fungsi pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan berkendara yang searah dengan tata tertib yang berlaku, pengelolaan wisata religi, atau penyediaan jasa transportasi lokal. Sementara fungsi pembangunan mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur pendukung pariwisata (Syarfi, 2002).

Di Desa Nyatnyono, keberhasilan pengembangan wisata religi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa melaksanakan keempat fungsi tersebut secara integratif dan partisipatif. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk menjadi pelaksana kebijakan dari pemerintah kabupaten atau pusat, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dari bawah (*bottom-up*). Ini termasuk menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan terkait pembukaan jalur transportasi umum, serta mengalokasikan anggaran dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata.

Namun demikian, peran ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta kepentingan masyarakat. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk mengembangkan wisata berbasis komunitas di Nyatnyono, mengingat tingginya

minat wisata religi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan desa wisata.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata Berbasis Religi Nyatnyono.”**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana peran yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam merespons permasalahan utama tersebut, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat realisasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan di tingkat desa serta memperkuat kajian akademik berkenaan pengelolaan desa wisata berbasis lokal.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas dapat dirumuskan kedalam perumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan aksesibilitas Desa Wiasata berbasis religi Nyatnyono?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan aksesibilitas Desa Wisata berbasis religi Nyatnyono?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengembangan aksesibilitas Desa Wiasata berbasis religi Nyatnyono
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan aksesibilitas Desa Wisata berbasis religi Nyatnyono

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik sehingga diharapkan mampu membagikan pemahaman secara mendalam berkenaan peran pemerintah desa dalam proses Pembangunan Desa. Di sisi lain. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana Pemerintah Desa Nyatnyono dalam menangani masalah dalam pengembangan potensi pariwisata desa dan dapat dimanfaatkan untuk memberi tambahan referensi serta tambahan informasi bagi masyarakat yang akan menelaah tentang penelitian dengan topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti, menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti tersendiri. Dan Penelitian ini juga merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang didapati dari perkuliahan dengan kegiatan penelitian di lapangan. Serta dapat dipergunakan sebagai bahan pedoman dalam ilmu metode penelitian dan dapat dijadikan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Menginformasikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat jika kemajuan sebuah desa terutama pada bidang pariwisata terdapat peran besar dari berbagai aktor seperti pemerintah

ataupun masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa peka terhadap segala potensi yang ada di daerahnya dan dapat secara aktif untuk berperan dalam proses pengembangannya.

1.4.2.3. Bagi Pemerintah

Sebagai pertimbangan pemerintah kedepannya supaya dapat mengerti bagaimana harusnya peran pemerintah dalam menghadapi masalah dan pengembangan potensi wisata di daerahnya.

1.5. Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi satu dari sebagian referensi penulis dalam mengadakan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan teori yang dipergunakan dalam menelaah penelitian yang dilakukan. Beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pemerintah desa, pengembangan desa, serta desa wisata. Penulis mengangkat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi dalam mengembangkan bahan kajian pada penelitian ini. Berikut Penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan

FY	“Peran	Kualitatif dan	1) integrasi antar	Perbedaan
Alfianto	Pemerintah Desa	metode	pemerintah dan	Penelitian
(2021)	Dalam	analisis data	masyarakat yaitu	Berposisi
	Pengembangan	Miles and	dengan berfokus	pada lokus
	Desa Wisata Di	Huberman	memunculkan	penelitian
	Pakuncen”		ciri khas yang	yaitu Desa
			ada di Desa	Wisata
			Pakuncen,	Nyatnyono
			2) Faktor yang	
			menghalangi	
			adalah anggaran	
			atau pendanaan	
			dan faktor yang	
			mendukungnya	
			adalah dukungan	
			dari masyarakat	
			terhadap rencana	
			tersebut hingga	
			terciptanya Desa	
			Wisata Religi	
			ini, dan	
			3) pejabat	
			pemerintah	

			harus segera menetapkan status hukum dari lokasi-lokasi wisata religi.	
Dian Herdiana (2019)	“Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat”	kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>)	1) desa dalam konteks pengembangan partisipatif, 2) desa dalam konteks pengembangan pariwisata, 3) tipologi desa wisata, 4) peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata	Perbedaan Penelitian Berposisi pada fokus penelitian berkenaan peran pemerintah desa

			berbasis masyarakat, dan 5) proses keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.	
Eet Saeful Hidayat (2020)	“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya”	Deskripsi Kualitatif	Terungkap bahwa pemerintah desa Raksabaya secara aktif berupaya mengembangkan pariwisata Curug Kembar, terutama dengan menata lokasi dengan berbagai fasilitas untuk	Perbedaan Penelitian Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa Wisata Nyatnyono

			meningkatkan infrastruktur secara keseluruhan. Hal ini penting karena pemerintah bertindak sebagai stabilisator, inovator, dan pelaksana sendiri.	
Prabowo (2018)	“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Gunungkidul”	Deskripsi Kualitatif	Pemerintah desa berlaku sebagai fasilitator dan penggerak dalam menyusun perencanaan pembangunan, membentuk kelembagaan pariwisata seperti	Perbedaan Penelitian Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa Wisata Nyatnyono

			kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta menggalang dukungan pihak eksternal.	
Putri dan Nugroho (2019)	“Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Pujon Kidul, Malang”	Deskripsi Kualitatif	Dalam penelitian ini, pemerintah desa berhasil mendorong masyarakat untuk mengelola potensi desa, khususnya dalam membuka usaha kuliner, homestay, dan edukasi pertanian.	Perbedaan Penelitian Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa Wisata Nyatnyono
Sari (2020)	“Peran Pemerintah Desa	Deskripsi Kualitatif	Pemerintah desa dalam penelitian	Perbedaan Penelitian

	dalam Pengembangan Wisata Religi di Makam Sunan Muria, Kudus”		ini berhasil menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, pos informasi, dan jalur akses. Hal ini menunjukkan peran strategis desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana wisata religi.	Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa Wisata Nyatnyono
Hendrawan (2021)	“Kendala Infrastruktur dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Nglanggeran”	Deskripsi Kualitatif	Pemerintah desa harus mampu menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah kabupaten dan	Perbedaan Penelitian Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa

			provinsi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran nyata terkait pengaruh faktor eksternal dan perlunya peran negosiasi dari pemerintah desa.	Wisata Nyatnyono
Lestari (2018)	“Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Akomodasi di Desa Candirejo”	Deskripsi Kualitatif	ketersediaan penginapan yang layak di desa wisata sangat tergantung pada peran pemerintah desa dalam memfasilitasi	Perbedaan Penelitian Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa Wisata Nyatnyono

			warga membuka homestay, termasuk memberikan pelatihan, izin usaha, dan promosi.	
Hidayat (2019)	“Pengaruh Infrastruktur dan Transportasi terhadap Daya Tarik Desa Wisata”	Deskripsi Kualitatif	menunjukkan bahwa kemudahan akses jalan dan tersedianya transportasi publik merupakan faktor penting yang meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemerintah desa menyimpan peran penting	Perbedaan penelitian berposisi pada fokus penelitian yang membahas berkenaan peran pemerinta desa

			dalam menyuarakan kebutuhan infrastruktur kepada instansi terkait.	
Fauziah (2022)	“Manajemen Pemerintah Desa dalam Mengembangka n Wisata Ziarah di Desa Panggungrejo”	Deskripsi Kualitatif	mengungkap bahwa pemerintah desa yang mampu menyusun perencanaan tahunan, mengatur jadwal ziarah, dan membangun kerja sama dengan tokoh agama serta lembaga adat, dapat menciptakan destinasi wisata	Perbedaan Penelitian Berposisi pada lokus penelitian yaitu Desa Wisata Nyatnyono

			religi yang berkelanjutan	
--	--	--	------------------------------	--

Pertama, FY Alfianto melakukan riset dalam penelitiannya berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Pakuncen”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan mengandalkan analisis Miles dan Huberman untuk melihat data. Hasil dari penelitian ini, 1) mempertemukan pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan mengedepankan fitur-fitur yang ada di Desa Pakuncen, 2) hambatan berasal dari kurangnya ekonomi atau dana yang cukup dan dukungan dapat berasal dari masukan masyarakat tentang pembangunan Desa Wisata Religi dan 3) pemerintah harus segera menjamin status hukum kawasan wisata religi di Pakuncen (Alfianto, 2021).

Kedua, penelitian yang diadakan oleh Dian Herdiana dalam penelitiannya berjudul “Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat”. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode perpustakaan, mengumpulkan data dari buku, jurnal, situs web, atau referensi serupa yang dianggap penting. Temuan kajian adalah: 1) bagaimana desa bekerja dalam pembangunan partisipatif, 2) desa dan perannya dalam Pembangunan Pariwisata, 3) tipologi desa wisata, 4) bagaimana masyarakat berperan dalam pembuatan desa wisata berbasis masyarakat dan 5) bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa pariwisata mereka sendiri (Herdiana, 2019).

Ketiga, penelitian yang diadakan oleh Eet Saeful Hidayat dalam penelitiannya berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya”. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data dengan meninjau literatur yang relevan dan mengamati di lapangan selama wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa Raksabaya berhasil bergerak maju dalam meningkatkan potensi wisata Curug Kembar dengan menyelenggarakan lokasi serta instalasi pendukung lainnya. Pemerintah berperan menstabilkan, inovatif dan protektif karena menjalankan fungsinya sendiri (Hidayat, 2020).

Keempat, Penelitian oleh Prabowo (2018) menjadi satu dari sebagian referensi penting yang menyoroti bagaimana pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul memainkan peran strategis dalam mengembangkan desa wisata berbasis alam. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa pemerintah desa turut aktif dalam merumuskan regulasi desa yang mendukung kegiatan wisata, memfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada potensi wisata lokal. Namun, tantangan utama yang dijalani adalah keterbatasan dana desa dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pengelolaan destinasi dan pemasaran digital. Temuan ini relevan karena menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme dalam tata kelola desa wisata .

Kelima, dalam konteks wisata religi, Wahyuni (2020) mengadakan penelitian di Desa Panggungrejo yang dikenal sebagai tujuan wisata ziarah. Dalam penelitiannya, Wahyuni menyoroti bahwa pengembangan wisata religi tidak hanya berurusan dengan aspek fisik, tetapi juga aspek spiritual dan sosial yang sangat erat dengan peran tokoh agama dan budaya lokal. Pemerintah desa dalam hal ini berperan dalam menyusun agenda kegiatan religius, memperbaiki fasilitas pendukung seperti akses jalan dan tempat parkir, serta menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk mendukung keberlanjutan kegiatan wisata. Studi ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan struktur sosial-keagamaan dalam memajukan wisata religi.

Keenam, masalah minimnya akomodasi juga menjadi sorotan dalam penelitian Lestari (2019) berkenaan pengembangan homestay di Desa Wisata Candirejo. Pemerintah desa di sana mengambil langkah-langkah aktif dengan mengadakan pelatihan manajemen homestay, memfasilitasi proses perizinan, serta mempromosikan penginapan lokal melalui berbagai media. Kolaborasi antara pemerintah desa dan warga mendorong tumbuhnya partisipasi ekonomi masyarakat secara langsung dari sektor pariwisata. Temuan ini relevan dengan kondisi Desa Nyatnyono yang juga belum memiliki penginapan memadai dan perlu dukungan dari pemerintah desa dalam memfasilitasi pembukaan usaha homestay berbasis rumah warga.

Ketujuh, Rohman dan Widodo (2021) meneliti kinerja pemerintah desa dan Pokdarwis dalam pengembangan wisata di Desa Pentingsari. Mereka menemukan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis. Pemerintah desa menjalankan fungsi koordinatif dan kebijakan, sedangkan Pokdarwis menjadi pelaksana teknis kegiatan wisata di lapangan. Pembagian peran ini menciptakan efisiensi dan membangun struktur kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan wisata desa.

Kedelapan, dalam studi yang lebih spesifik pada wisata religi, Sari (2020) menelaah peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan ziarah di Makam Sunan Muria. Meskipun kawasan ini sudah lama menjadi destinasi populer, peneliti menemukan bahwa pengelolaan kawasan masih bersifat tradisional dan belum terintegrasi dengan sistem desa wisata. Pemerintah desa cenderung hanya menjadi penyedia fasilitas dasar tanpa memiliki strategi pembangunan jangka panjang yang melibatkan potensi ekonomi masyarakat secara langsung. Studi ini memperlihatkan pentingnya transformasi paradigma dari sekadar pengelolaan tempat ziarah menuju pengembangan kawasan wisata yang komprehensif.

Kesembilan, aspek transportasi sebagai satu dari sebagian penunjang utama dalam pengembangan desa wisata menjadi fokus penelitian Hidayat (2019). Ia menelaah pengaruh infrastruktur dan aksesibilitas terhadap daya tarik desa wisata. Temuan menunjukkan bahwa desa wisata yang memiliki akses transportasi memadai, seperti jalan yang baik dan moda transportasi

umum yang menjangkau langsung lokasi wisata, cenderung mengalami peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan. Penelitian ini memberikan landasan penting bahwa keberadaan transportasi umum merupakan faktor yang sangat memengaruhi kelancaran dan kenyamanan kunjungan wisatawan, khususnya dalam konteks wisata religi seperti Nyatnyono yang belum terintegrasi dengan angkutan umum.

Terakhir, penelitian oleh Amalia (2017) tentang pemberdayaan ekonomi melalui desa wisata di Bali menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai pengorganisasi pelatihan keterampilan, promotor potensi lokal, serta fasilitator kerja sama dengan sektor swasta. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengelola usaha wisata seperti kuliner, kerajinan, dan penginapan. Studi ini menegaskan bahwa pembangunan desa wisata yang berhasil adalah yang mampu melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan mengubahnya dari objek menjadi subjek pembangunan.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian tersebut, dapat dirangkum dalam kesimpulan bahwa pemerintah desa menyimpan peran multidimensional dalam pengembangan desa wisata, baik sebagai perencana, fasilitator, penggerak sosial, sampai pelindung nilai-nilai lokal. Peran-peran tersebut perlu dijalankan secara sinergis dengan aktor lain seperti Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan dinas terkait agar mampu menjawab tantangan struktural seperti akses transportasi yang buruk dan

minimnya fasilitas penginapan. Maka itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana peran pemerintah desa di Desa Nyatnyono dijalankan dalam konteks unik wisata religi, serta bagaimana upaya pemerintah desa dalam menghadapi hambatan dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2010). Administrasi Publik adalah proses melibatkan pengelolaan dan pengaturan sumber daya publik dan orang-orang untuk membangun, meloloskan, dan melaksanakan keputusan dalam kebijakan publik. Nigro dan Nigro, antara lain, menyatakan bahwa untuk setiap tindakan hukuman yang berhasil, tindakan tersebut harus dikembangkan dari dalam badan peradilan (Syafiie, 2006) administrasi publik adalah:

1. Administrasi Publik adalah kelompok dalam pemerintahan yang bekerja sama.
2. Administrasi Publik berkaitan dengan tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan bagaimana mereka berkaitan.
3. Administrasi Publik membantu mengembangkan kebijakan pemerintah dan karenanya mengambil bagian dalam urusan politik.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat juga erat kaitannya dalam Administrasi Publik dengan berbagai kelompok dan individu swasta.
5. Beberapa aspek Administrasi Publik tidak sama dengan aspek administrasi Perseorangan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Para peneliti di bidang administrasi publik telah berfokus pada lima paradigma berbeda yang tumpang tindih. Setiap tahapan dalam paradigma ditentukan sesuai dengan locus dan focus nya. Locus menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut berada. Adapun focus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi. Menurut Barker dalam (Suwitri, 2009), sebuah paradigma terdiri dari aturan-aturan khusus (ada yang tertulis, ada yang tidak) yang (1) menentukan area di mana Anda harus bertindak dan (2) menginstruksikan Anda tentang perilaku yang sesuai di area tersebut untuk dikenali. Paradigma adalah perubahan dalam sains, yang dibawa oleh sekelompok orang yang memiliki kepedulian yang sama terhadap suatu masalah tertentu. Untuk menangani situasi krisis, Thomas Kuhn meyakini, sains harus menciptakan paradigma yang dapat menangani keadaan darurat tersebut (Suwitri, 2009).

Perkembangan atau perubahan gagasan pokok (terutama dari Simon, 1947; Waldo, 1968; Thoha, 1988 dalam Sardjudin 1995 dan Tjokroamidjojo, 1988) yang menggambarkan bagaimana Administrasi Negara dipandang, terdiri dari lima gagasan pokok.

Paradigma pertama, yaitu penekanan ditempatkan pada perbedaan politik dan administrasi negara (pada awal 1900-an hingga 1930-an). Ketika menerapkan paradigma ini, Administrasi Negara berkaitan dengan organisasi birokrasi, perekrutan staf dan penganggaran di sisi lain, ilmu politik meliputi pemerintahan, politik dan kebijakan. Penekanan pada

paradigma ini adalah pada locus-nya, yakni mempersalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Secara jelas, menurut Goodnow dan pengikut-pengikutnya, administrasi harus didasarkan terutama pada birokrasinya. Jenis pola pikir ini mencakup antara lain:

1. Administrasi harus dilanjutkan tanpa campur tangan politik.
2. Bidang manajemen memberikan bimbingan ilmiah kepada administrasi.
3. Administrasi pemerintahan masing-masing negara harus berusaha untuk membuktikan objektivitasnya.
4. Tujuan utama dari bidang ini adalah untuk mempromosikan penghematan dan efisiensi.

Paradigma kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1950an). Di sini, Administrasi Negara menggunakan ide-ide yang dianggap berguna secara umum untuk semua pengaturan organisasi dan sosial. Pada tahap ini, administrasi negara mencapai tingkat penghormatan terbesar dari penduduk. Pada tahun 1930-an, pemerintah mendapat keuntungan dari masukan para ahli dari industri dan pemerintah. Akibatnya, kemajuan pengetahuan manajemen sangat berkontribusi pada penciptaan prinsip-prinsip administrasi ini. Gagasan yang ditekankan adalah bahwa administrasi negara dapat eksis dan digunakan di negara mana pun, terlepas dari apa tradisi budayanya, fungsi tempat kerja, pengaturan, misi, atau pendirian organisasinya.

Paradigma ketiga, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik dari tahun 1950-an hingga 1970-an. Sejak itu, para ilmuwan politik mulai mempertimbangkan administrasi negara sebagai cabang ilmu politik. Pemahaman ini menyatakan bahwa tidak mungkin memecah belah politik dan administrasi karena hubungannya yang kuat. Prinsip-prinsip administrasi dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga memiliki berbagai nilai. Karena ilmu politik melibatkan administrasi negara, Administrasi Negara juga termasuk dalam bidang ini, tetapi berfokus pada masalah yang berbeda. Pembuatan kebijakan dipelajari secara berbeda dalam ilmu politik jika dilakukan oleh orang luar dan oleh birokrat dalam administrasi negara, meskipun demikian keduanya terikat dengan sistem politik saat ini. Secara singkat, fase ini adalah tentang mencoba menghubungkan kembali gagasan antara administrasi negara dan ilmu politik. Namun, ini berarti bahwa menciptakan bidang seperti itu membuat kita fokus pada bidang keahlian intinya.

Paradigma keempat, yaitu administrasi publik diganti dengan fokus pada administrasi negara sebagai Ilmu Administrasi (dari tahun 1956 hingga 1970-an). Ilmu Administrasi Negara dalam ilmu politik, selanjutnya harus mengembangkan dua bidang yang saling terkait: satu dari psikologi sosial dan yang lainnya dari rincian kebijakan publik. Istilah ilmu administrasi (*administrative science*) dipergunakan dalam pada paradigma keempat ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan. Dalam ilmu ini, orang juga melihat teori organisasi dan Ilmu Manajemen. Secara umum, masukan

utama teori organisasi berasal dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi sosial, korporasi, dan sosiologi. Penelitian yang dilakukan oleh ahli statistik, analisis sistem, komputer dan ekonomi memainkan peran utama dalam ilmu manajemen.

Paradigma kelima, yaitu sejak tahun 1970-an paradigma ini dikenal dengan administrasi negara sebagai administrasi. Konsep ini menggantikan konsep yang lebih lama. Administrasi Negara tidak hanya berfokus pada analisis ilmiah atau kebijakan, tetapi juga terkait dengan bidang sains lainnya. Dalam Administrasi Negara, mata pelajaran utamanya adalah teori organisasi, mengkaji kebijakan, proses manajemen modern, berbagai urusan birokrasi serta kebutuhan dan harapan masyarakat. Secara keseluruhan, struktur administrasi negara lebih terlibat dalam urusan kemasyarakatan, bangsa dan kenegaraan. Orang dapat berasumsi bahwa aspek-aspek ini sering kali mewakili hubungan antara *focus* Administrasi Negara dan *locus*-nya.

Denhardt dan Denhardt menyatakan dalam Mulyadi, Dedddy (2016) bahwa perjalanan administrasi publik meliputi *OPA*, *NPM*, *NPS* dan *Good Governance*.

1. *Old Public Administration (OPA)*

Administrasi publik pada masa *Old Public Administration (OPA)* memiliki struktur yang hirarkis legalistik, dan sangat sentralistik. Paradigma ini terbentuk pada hari-hari awal Ilmu Administrasi Negara dimulai. Wilson (1887) menyoroti dalam karyanya "*the Study of Administration*" bahwa

rendahnya kapasitas administrasi menjadi isu sentral yang dihadapi pemerintah. Pemerintah pada paradigma ini menguasai dengan aturan yang mengikat dan terlalu ikut campur ke dalam kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan pemerintah dibuat tanpa melibatkan partisipasi dari pihak swasta ataupun masyarakat. Hal tersebut menyebabkan tumpang tindihnya tujuan pokok dan fungsi yang ada pada tatanan birokrasi pemerintahan. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah cenderung kaku dan berbelit-belit serta semakin menjauhkan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Adapun paradigma administrasi publik klasik ini memfokuskan pada efisiensi dan rasionalitas tanpa memperhatikan segi kemanusiaan dan internal organisasinya (Wilson, 1887).

2. *New Public Management (NPM)*

Paradigma *New Public Management (NPM)* merupakan perbaikan dari paradigma *Old Public Administration (OPA)*. Paradigma ini mencoba memperbaiki kinerja pemerintah yang lamban dalam menghadirkan pelayanan publik. Paradigma *New Public Management (NPM)* mencoba memasukkan prinsip atau semangat kewirausahaan seperti sektor privat. Sektor publik dalam hal ini ditekankan untuk mengikuti sistem dari sektor privat dengan cara mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Para pemikir dalam teori ini menuntut agar kapasitas birokrasi diperkecil dengan cara jumlah aparatur birokrasi dikurangi dan hendaknya diadakan pendelegasian ke sektor swasta dan mekanisme pasar. Inti dari paradigma ini yaitu pemerintah

yang kaku dalam paradigma *Old Public Administration* (OPA) harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa usaha untuk merealisasikan semangat kinerja yang tinggi. *New Public Management* (NPM) dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan fungsi layanan publik dalam birokrasi saat ini dengan mengadopsi wawasan dan strategi bisnis (Vigoda, 2003).

3. *New Public Service* (NPS)

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan sebuah kritikan terhadap *Old Public Administration* (OPA) dan *New Public Management* (NPM). Paradigma ini berpandangan bahwa kedua paradigma tersebut belum memberikan kesejahteraan, bahkan menyebabkan ketidakadilan dalam melayani masyarakat. Dalam paradigma ini, pemerintah dalam melayani masyarakat harus tidak diskriminatif. Masyarakat seharusnya diduga sebagai warga negara bukan *client* seperti di *Old Public Administration* (OPA) dan *customer* seperti di *New Public Management* (NPM), dan memposisikan masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan. Pemerintah harus lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya.

4. *Good Governance*

Paradigma *Good Governance* datang untuk menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. Dalam paradigma *Good Governance*, partisipasi dari berbagai pihak (masyarakat, sektor internal publik, dan sektor swasta) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Secara keseluruhan, metode ini berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan yang ditawarkan PNS dengan upaya kerjasama dari organisasi eksternal. Akibatnya, dalam konteks Administrasi Publik, tata kelola yang baik seharusnya membantu pegawai pemerintah menjalankan tugasnya dengan lancar. UNDP mendemonstrasikan *good governance* yang baik dengan cara-cara berikut (Rondinelli, 2007).

Participation, setiap orang harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui pejabat terpilih. *Rule of Law*, bahwa semua undang-undang dan terutama undang-undang tentang hak asasi manusia, harus adil dan ditegakkan secara adil pada semua orang. *Transparency*, bahwa keterbukaan itu khususnya bergantung pada informasi yang tidak dibatasi. Semua orang yang tertarik perlu mengakses berbagai proses, institusi, dan informasi. *Responsiveness*, bahwa institusi-institusi dan proses yang ada harus difokuskan untuk memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan. *Consensus Orientation*, perlu ada cara bagi setiap orang untuk setuju, menggunakan kepentingan kelompok dan prosedur bila memungkinkan. *Equity*, bahwa semua orang dapat sama-sama meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka. *Effectiveness and Efficiency*, bahwa sistem yang ada mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selengkap mungkin dengan sumber daya yang sudah tersedia. *Accountability*, bahwa pengambil keputusan instansi pemerintah, sektor publik dan masyarakat sipil (*civil society*) harus dapat menjelaskan kepemilikan dan keputusannya kepada publik maupun pemangku kepentingan. *Strategic Vision*, bahwa para pemimpin dan orang-orang

dalam masyarakat harus memandang pembangunan manusia dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan masa lalunya dan pengaruh budaya yang berbeda.

Semua paradigma diatas memperlihatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir fokus Administrasi Publik telah berkembang dengan cepat. Kesulitan suatu negara disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk mengikuti konsep-konsep baru dalam Administrasi Publik. Karena itu, peran kunci Administrasi Publik dan penanganan cepat perubahannya dianggap penting.

1.5.4 Pemerintah Desa

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa berarti penanganan administrasi bagi masyarakat lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa disebut dalam alinea ketiga sebagai pemerintah desa atau menggunakan nama lain dan merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengembangkan desa dan bekerja untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat setempat. Bupati memberikan perintah kepada kepala desa melalui camat yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Masyarakat desa dipimpin oleh pemerintah desa, sehingga merupakan tingkat pemerintahan paling dasar di tanah air Republik Indonesia (Nugroho R. &., 2021).

1.5.5 Pengembangan Pariwisata

W.J.S. Poerwadarminta dalam (Amerta, 2019), menjelaskan bahwa saat ini, pembangunan terutama difokuskan untuk membuat segala sesuatunya berkembang menjadi kemajuan, kualitas, kesempurnaan, dan manfaat daripada pendekatan sebelumnya. Ini berarti bahwa sampai hasil yang diinginkan diperoleh, pembangunan dipandang berkelanjutan.

Samsul Alam Paturusi sebagaimana dikutip dalam (Amerta, 2019), menegaskan bahwa pembangunan mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan daya tarik wisata agar menarik bagi wisatawan. Alternatifnya, dapat mendukung penduduk lokal, otoritas lokal, industri pariwisata, dan semua orang yang tinggal di daerah tersebut.

Robert Christie Mill dalam (Amerta, 2019), mengklaim bahwa tujuan utama Pengembangan Pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan tertinggi dengan memperbaiki masalah terkait. Enam tahap pengembangan pariwisata yang berbeda masing-masing dapat menyebabkan hasil dan dampak yang berbeda. Butler menjelaskan dalam (Amerta, 2019), bahwa tahapan-tahapannya adalah seperti berikut:

1. Tahap Ekplorasi (Exploration)

Pada titik ini, pemerintah daerah dan masyarakatnya mulai mempertimbangkan bagaimana mereka dapat memanfaatkan pariwisata setelah menyadari potensinya.

2. Tahap Keterlibatan (*Involvement*)

Pada era ini, pengembangan tempat wisata mulai diupayakan secara serius dan industri pariwisata mulai dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, fasilitas kesehatan, dan inisiatif pemberdayaan Masyarakat.

3. Tahap Pengembangan dan Pembangunan (*Development*)

Pada tahap ini, investor dari luar mulai bermunculan untuk menunjang mengembangkan pariwisata.

4. Tahap Konsolidasi (*Consolidation*)

Pada fase ini, tingkat pertumbuhan pengunjung sudah mulai melambat, namun secara keseluruhan jumlah pengunjung masih relatif meningkat.

5. Tahap Kestabilan (*Stagnation*)

Pada tahap ini destinasi wisata sudah menggapai titik jenuhnya.

6. Tahap Penurunan Kualitas (*Decline*) dan Kelahiran Baru (*Rejuvenation*)

Ada dua kemungkinan apabila suatu destinasi wisata berada dalam fase stagnan. Pertama yaitu terjadi penurunan (*Decline*) dan yang kedua adalah berhasil berinovasi dan memasuki fase kelahiran baru (*Rejuvenation*). Saat masa stagnasi, kelahiran kembali dan inovasi diperlukan agar destinasi wisata tetap bisa bertahan. Ini sangat bergantung pada pemikiran matang dan rencana tindakan yang menuntut kreativitas dan adaptivitas.

1.5.6 Desa Wisata

Menurut Gamal Suwanto dalam (Amerta, 2019), desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memberikan suasana utuh yang mencerminkan keaslian desa, meliputi tata ruang, arsitektur bangunan, pola kehidupan sosial budaya masyarakat, serta ritual sehari-hari. Di samping itu, mampu memenuhi komponen kebutuhan mendasar wisatawan, antara lain penginapan, makanan dan minuman, kenang-kenangan, dan atraksi wisata.

Desa wisata termasuk dalam kategori usaha kecil karena memanfaatkan sumber daya lokal, membutuhkan sedikit modal awal, dan dikendalikan serta dipunyai oleh masyarakat. Desa wisata dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan identitas dan ciri khas daerah sesuai dengan kearifan lokal, prinsip dan praktek adat (Amerta, 2019).

1.5.7 Peran

Teori peran merupakan salah satu teori utama dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menganalisis perilaku individu maupun kelompok dalam struktur sosial tertentu. Dalam konteks pemerintahan, teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah sebagai aktor sosial menjalankan peran dan fungsi yang diharapkan oleh masyarakat serta lembaga-lembaga lain dalam sistem politik. Menurut Bruce J. Biddle (1986), peran adalah kumpulan harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati posisi sosial tertentu. Harapan ini membentuk kerangka perilaku yang dianggap tepat dalam situasi sosial tertentu. Dalam hal ini, pemerintah

memiliki peran-peran spesifik yang muncul dari ekspektasi masyarakat, konstitusi, serta norma hukum yang berlaku.

Ralph Linton (dalam Isra Hayati, 2021:7) berpendapat bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, antara peran dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

Agustina (dalam M. Aristia Prayudi, dkk, 2018:453) juga menyatakan bahwa peran merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya. Beberapa peneliti telah mengaplikasikan konsep-konsep pada teori peran dalam menjelaskan adanya hubungan antara peran yang dirasakan dan dilekatkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya.

1.5.8 Peran Pemerintah Desa

Pembangunan desa wisata menjadi satu dari sebagian strategi penting dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi budaya, alam, dan religi. Namun, keberhasilan desa wisata sangat tergantung pada dukungan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai, satu dari bagiannya adalah keberadaan transportasi umum yang memadai. Sayangnya, banyak desa wisata di Indonesia, terutama yang berbasis religi dan berada di daerah perbukitan atau pinggiran, menghadapi kendala besar dalam hal konektivitas transportasi. Desa Wisata Religi Nyatnyono, misalnya, belum memiliki jalur transportasi umum yang langsung menghubungkannya dengan pusat kota, terminal, atau stasiun terdekat.

Dalam konteks ini, peran pemerintah desa sangat krusial. Menurut (Syarfi, 2002), peran pemerintah desa dapat dianalisis melalui empat fungsi utama: fungsi pelayanan, fungsi pengaturan (regulasi), fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Keempat fungsi ini dapat menjadi landasan teoritis yang kuat dalam mengerti bagaimana pemerintah desa dapat merespons dan mengatasi permasalahan keterisolasian transportasi tersebut.

1.5.7.1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan mengacu pada tanggung jawab pemerintah desa dalam menyediakan layanan publik dasar bagi masyarakat, baik dalam bentuk administratif ataupun pelayanan fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Dalam hal ini, pelayanan

transportasi termasuk dalam kategori pelayanan publik yang sangat vital, terutama dalam mendukung aktivitas pariwisata desa.

Pemerintah desa harus mampu menjalankan pelayanan yang mengutamakan akses, efisiensi, dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Dalam konteks desa wisata, fungsi pelayanan mencakup inisiatif untuk mengatasi keterbatasan akses transportasi dengan langkah-langkah pragmatis, seperti (Syarfi, 2002):

- Menyediakan layanan informasi transportasi, baik online ataupun offline, untuk wisatawan yang ingin menuju desa.
- Membangun pusat layanan informasi dan logistik transportasi di balai desa atau titik strategis.
- Membentuk sistem antar-jemput wisata berbasis komunitas, bekerja sama dengan pemilik kendaraan lokal seperti angkutan pedesaan (angkudes), ojek, atau mobil pribadi warga.

Pelayanan yang baik menjadi fondasi bagi citra positif desa wisata. Pelayanan publik yang berkualitas di desa merupakan modal sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal (Pranadji, 2006).

1.5.7.2. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi regulasi adalah peran pemerintah desa dalam menyusun dan menegakkan aturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat secara adil dan tertib. Dalam

hal transportasi menuju desa wisata, peraturan sangat penting agar kegiatan transportasi berjalan secara tertib dan profesional.

Fungsi pengaturan mencakup perumusan kebijakan lokal dan norma sosial yang mengikat secara hukum ataupun budaya. Dalam konteks ini, pemerintah desa dapat (Syarfi, 2002):

- Menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang operasional transportasi lokal, termasuk tarif, rute, keamanan, dan standar layanan.
- Mengatur kerja sama dengan pihak ketiga seperti travel agent, jasa sewa mobil, atau operator angkutan online dengan sistem yang menguntungkan desa.
- Menetapkan zona transportasi wisata, seperti area drop-off, zona parkir, dan jalur kendaraan yang boleh masuk ke kawasan religi.

Tanpa regulasi yang baik, pelayanan publik di tingkat desa cenderung mengalami kekacauan karena tidak ada kepastian hukum dalam realisasinya. Maka dari itu, regulasi menjadi instrumen penting untuk menjaga harmoni antara pelaku usaha transportasi lokal dan kenyamanan wisatawan (Dwiyanto, 2006).

1.5.7.3. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat.

Dalam konteks transportasi menuju desa wisata, pemberdayaan berarti mendorong masyarakat desa untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor transportasi wisata (Syarfi, 2002).

Implementasi fungsi pemberdayaan dapat diadakan dengan cara:

- Pelatihan sopir dan penyedia jasa transportasi lokal, tentang pelayanan prima, keselamatan berkendara, serta komunikasi dengan wisatawan.
- Pendampingan pembentukan koperasi atau BUMDes Transportasi, yang mengelola sistem antar-jemput wisata dari titik tertentu (misal: terminal, stasiun, kota terdekat) menuju desa.
- Fasilitasi akses permodalan, melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro atau program CSR, agar masyarakat bisa membeli atau memperbaiki kendaraan operasional mereka.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam sektor transportasi wisata, maka tidak hanya akan muncul solusi lokal terhadap permasalahan akses, tetapi juga terjadi pengoptimalan kesejahteraan masyarakat (Chambers R. , 1994).

1.5.7.4. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan adalah peran pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan pembangunan fisik ataupun nonfisik

guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung potensi ekonomi lokal. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi aspek vital. Pembangunan tidak hanya berarti pembangunan jalan, tetapi juga pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung sistem transportasi. Adapun bentuk konkret dari fungsi ini di antaranya (Syarfi, 2002):

- Peningkatan kualitas jalan desa dan akses penghubung ke jalan utama yang mengizinkan kendaraan wisata masuk dengan mudah.
- Pembangunan halte mini atau tempat tunggu transportasi wisata di dekat pusat keramaian atau gerbang desa.
- Pemasangan rambu-rambu penunjuk arah dan papan informasi di titik-titik penting menuju desa.

Teori Syafri (2002) tentang empat fungsi utama pemerintah desa memberikan kerangka konseptual yang aplikatif dalam menghadapi permasalahan transportasi menuju desa wisata. Fungsi pelayanan menekankan pentingnya penyediaan sarana dan informasi bagi wisatawan, fungsi pengaturan mengarahkan pada tata kelola transportasi berbasis hukum desa, fungsi pemberdayaan membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha transportasi, dan fungsi pembangunan berfokus pada penyediaan infrastruktur dan kelembagaan yang mendukung.

Dengan menerapkan keempat fungsi yang disebutkan oleh Syafri, pemerintah tidak hanya menjadi pihak yang mengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan motor penggerak pembangunan desa wisata. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan dinas-dinas teknis seperti Dinas Pariwisata ataupun Dinas Perhubungan harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar yang menghambat perkembangan desa wisata, seperti akses transportasi yang terbatas.

Penting untuk dicatat bahwasanya peran pemerintah tidak bersifat tunggal, melainkan harus diadakan secara simultan dan berkelanjutan. Misalnya, membangun jalan tanpa adanya transportasi umum yang menghubungkannya tetap akan menyulitkan wisatawan. Maka itu, penerapan teori peran pemerintah ini harus diadakan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa wisata.

Dengan merujuk pada teori Syafri (2002), maka dapat dirangkum dalam kesimpulan bahwasanya peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis religi seperti yang terjadi di Desa Wisata Nyatnyono. Ketiadaan kendaraan umum yang langsung terhubung ke desa bukan hanya masalah teknis, melainkan mencerminkan perlunya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara komprehensif demi meningkatkan daya tarik, kenyamanan, dan aksesibilitas desa wisata.

1.5.9 Faktor Pendukung dan Penghambat

Menurut Todaro dan Smith (2011), keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu modal sosial, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kebijakan fiskal yang mendukung. Keempat variabel ini saling berkaitan dan membentuk fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan sosial suatu wilayah, termasuk dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis religi seperti Desa Nyatnyono di Kabupaten Semarang (Todaro, 2011).

1.5.8.1. Modal Sosial

Modal sosial mencakup kepercayaan, norma, dan jejaring sosial yang mengizinkan masyarakat untuk bekerja sama secara efisien guna menggapai tujuan bersama (Putnam, 2000). Dalam konteks desa wisata, modal sosial menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap potensi wisata lokal. Partisipasi aktif warga, hubungan yang harmonis antara tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa, serta gotong royong dalam menjaga dan mengembangkan destinasi religi seperti makam Kyai Muchammad Kirang sangat bergantung pada kekuatan modal sosial ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Todaro dan Smith (2011, hal. 367), *“Social capital, in the form of interpersonal trust and community engagement, is critical in mobilizing local resources and ensuring participatory development.”* Dengan demikian, penguatan

modal sosial melalui pengorganisasian komunitas sadar wisata (Pokdarwis), penguatan kelembagaan informal, dan edukasi masyarakat akan pentingnya wisata religi menjadi elemen krusial dalam pembangunan desa.

1.5.8.2. Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan merujuk pada kemampuan institusi lokal terutama pemerintah desa untuk merancang kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengelola potensi lokal secara efisien. Di banyak desa wisata, lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi penghambat utama dalam proses pengembangan destinasi. Hal ini termasuk keterbatasan dalam perencanaan tata ruang wisata, pengelolaan anggaran desa, dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti dinas pariwisata atau investor.

Todaro dan Smith (2011, hal. 391) menyatakan bahwa *“Strong and accountable local institutions are essential for ensuring efficient service delivery and for creating an enabling environment for local development.”* Dalam hal ini, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen pariwisata, keuangan desa, serta pengembangan jejaring kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting yang perlu diadakan agar desa mampu mengelola dan memaksimalkan potensi wisata religius yang ada.

1.5.8.3. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor determinan dalam mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Dalam konteks Desa Wisata Religi Nyatnyono, permasalahan utama yang sering muncul adalah terbatasnya akses transportasi umum menuju desa. Ketiadaan infrastruktur yang memadai berdampak langsung pada rendahnya minat kunjungan wisatawan dan terbatasnya durasi tinggal mereka.

Todaro dan Smith (2011, hal. 394) menekankan bahwa *“Physical infrastructure such as roads, electricity, water supply, and telecommunications are vital inputs for development and poverty alleviation”*. Dalam pengembangan desa wisata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur bukan hanya menjadi penunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan, yang secara tidak langsung akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

1.5.8.4. Kebijakan Fiskal yang Mendukung

Kebijakan fiskal yang mendukung merupakan aspek penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa wisata. Ini mencakup alokasi anggaran yang memadai dari APBDes, dukungan dana dari pemerintah kabupaten atau provinsi, serta insentif fiskal bagi pelaku usaha lokal atau investor. Tanpa kebijakan fiskal yang

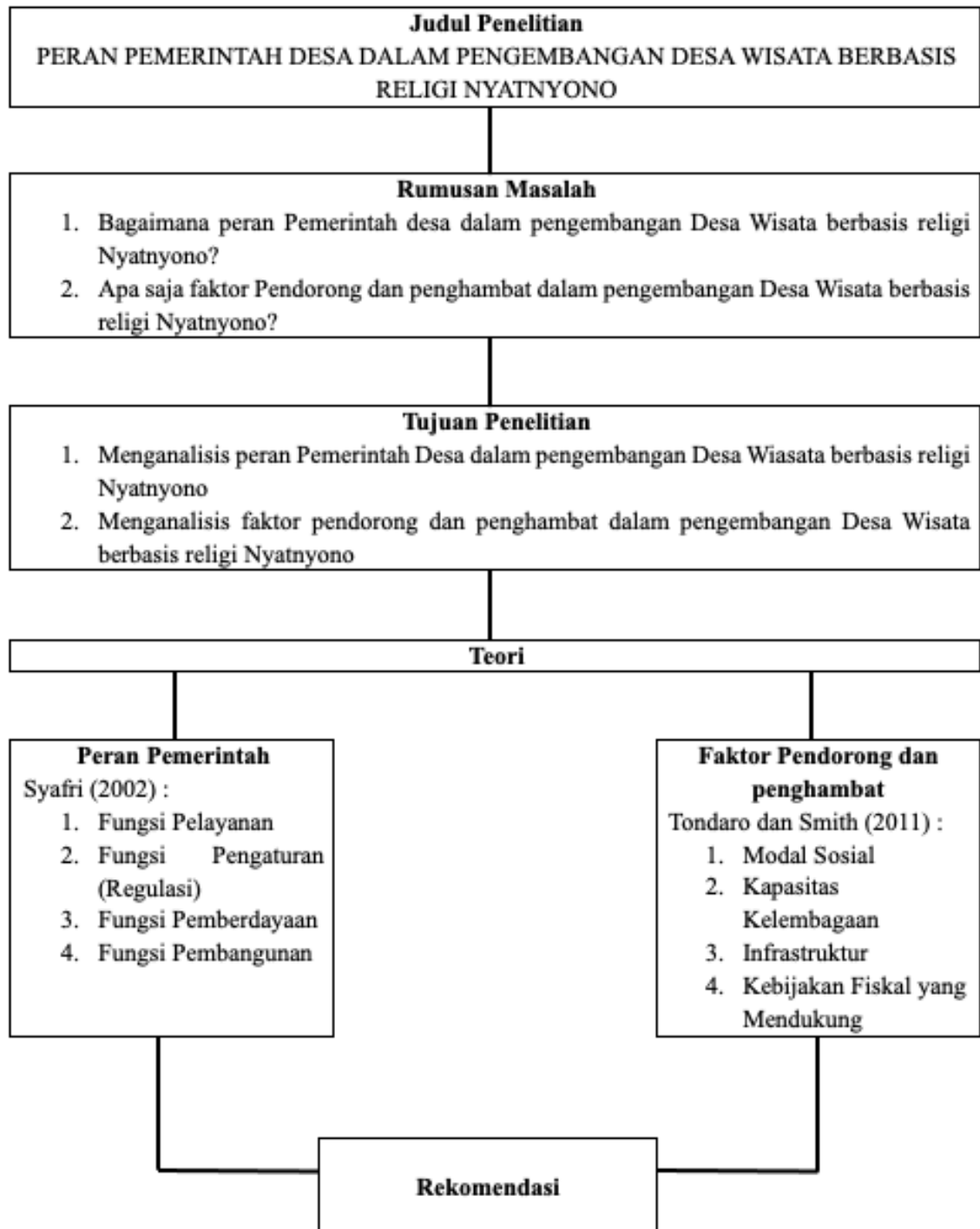
berpihak pada pengembangan pariwisata, desa akan kesulitan mengadakan pembangunan fisik ataupun non-fisik.

Menurut Todaro dan Smith (2011, hal. 402) “*Targeted fiscal policies can reduce regional disparities and stimulate economic activities in rural and underdeveloped areas.*” Maka itu, perlu ada sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menyusun strategi anggaran yang pro-wisata, termasuk upaya mengakses Dana Desa tematik pariwisata, hibah infrastruktur wisata dari kementerian terkait, serta pendampingan keuangan dari lembaga donor atau CSR perusahaan.

Pengembangan desa wisata berbasis religi seperti Nyatnyono sangat selaras dengan pendekatan pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2011). Modal sosial, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kebijakan fiskal menjadi elemen fundamental yang harus diperkuat secara simultan. Pemerintah desa memegang peran strategis dalam mengoordinasikan sumber daya lokal dan eksternal, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

1.6. Kerangka Berpikir

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Peneliti



1.7. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, konsep peran pemerintah desa dioperasionalkan ke dalam empat fungsi utama yang menjadi fokus pengamatan lapangan dan analisis data. Setiap fungsi akan dijabarkan menjadi beberapa indikator atau variabel yang menggambarkan bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan secara konkret dalam konteks pengembangan desa wisata dan pengelolaan masalah aksesibilitas transportasi.

1.7.1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan adalah bentuk nyata dari tugas pemerintah desa dalam menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks desa wisata yang belum memiliki akses transportasi umum yang terintegrasi, fungsi ini dioperasionalkan melalui beberapa indikator seperti:

- Ketersediaan informasi transportasi
- Fasilitas layanan antar-jemput
- Responsivitas pemerintah desa terhadap keluhan transportasi

Fungsi ini menjadi dasar dari pelayanan yang bersifat langsung dan kasat mata, serta merupakan ujung tombak dalam membangun persepsi wisatawan terhadap kenyamanan berkunjung ke desa.

1.7.2. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi pengaturan atau regulasi mengacu pada kewenangan pemerintah desa untuk membuat kebijakan lokal yang mengatur tata kelola dan mekanisme operasional transportasi di wilayah desa. Dalam konteks ini, beberapa indikator yang diidentifikasi meliputi:

- Keberadaan Peraturan Desa (Perdes) terkait transportasi
- Kemitraan dengan pihak ketiga
- Tata kelola lalu lintas di lingkungan desa wisata

Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah desa dapat mengarahkan pengelolaan transportasi menjadi tertib, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan warga setempat.

1.7.3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan peran strategis pemerintah desa dalam mengembangkan kapasitas masyarakat supaya dapat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek penerima manfaat. Dalam permasalahan transportasi menuju desa wisata, fungsi ini dioperasionalkan melalui:

- Pelatihan masyarakat sebagai pelaku transportasi wisata.
- Keterlibatan BUMDes atau koperasi dalam sektor transportasi
- Fasilitasi akses permodalan usaha transportasi

Pemberdayaan ini penting tidak hanya untuk menjawab kebutuhan transportasi, tetapi juga untuk menghadirkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung dari sektor pariwisata.

1.7.4. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan adalah peran pemerintah desa dalam menciptakan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengembangan ekonomi lokal. Dalam hal

ini, aspek pembangunan yang berkaitan dengan transportasi umum mencakup:

- Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
- Pembangunan fasilitas pendukung transportasi

Fungsi pembangunan tidak hanya menasar perbaikan fisik, tetapi juga penguatan kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

1.7.5. Faktor Pendukung dan penghambat

Terdapat empat variabel penting yang memengaruhi keberhasilan pembangunan, yaitu modal sosial, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kebijakan fiskal yang mendukung. Untuk menyesuaikan teori ini ke dalam konteks pengembangan desa wisata, khususnya desa wisata religi, setiap variabel tersebut dioperasionalkan ke dalam dimensi dan indikator yang dapat diamati dan dianalisis dalam penelitian lapangan.

Pertama, modal sosial dioperasionalkan melalui beberapa aspek seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, tingkat kepercayaan antara warga dan terhadap pemerintah desa, serta keberadaan dan aktivitas kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Modal sosial dapat diamati melalui kegiatan gotong royong, keterlibatan warga dalam pelatihan atau acara keagamaan yang mendukung pariwisata, serta sejauh mana komunitas lokal menjalin hubungan kerja sama yang harmonis untuk mendukung destinasi wisata religi.

Kedua, kapasitas kelembagaan merujuk pada kemampuan institusi lokal, terutama pemerintah desa, dalam merencanakan, mengelola, dan

mengembangkan program wisata. Operasionalisasi dari konsep ini meliputi tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wisata (seperti rencana strategis atau masterplan), jumlah kerja sama yang dibangun dengan pihak eksternal (seperti dinas pariwisata, LSM, atau perguruan tinggi), dan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa yang dilihat dari keterlibatan mereka dalam pelatihan-pelatihan terkait pariwisata, manajemen keuangan, dan pelayanan publik.

Ketiga, infrastruktur dioperasionalkan melalui tiga dimensi penting, yaitu aksesibilitas transportasi, ketersediaan fasilitas pendukung, dan konektivitas antar lokasi wisata. Dalam konteks Desa Nyatnyono, hal ini mencakup kondisi jalan menuju lokasi wisata religi, ketersediaan kendaraan umum yang terintegrasi, fasilitas seperti toilet umum, tempat parkir, tempat istirahat, penginapan, serta keberadaan papan informasi atau penunjuk arah menuju situs religi seperti makam Kyai Muchammad Kirang. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendukung penting untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan.

Keempat, kebijakan fiskal yang mendukung dioperasionalkan melalui indikator seperti alokasi anggaran desa untuk kegiatan pengembangan pariwisata, jumlah bantuan dana dari pemerintah kabupaten atau provinsi, dan adanya insentif atau pembinaan bagi pelaku usaha lokal di sektor wisata. Hal ini mencerminkan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan konkret terhadap pengembangan ekonomi berbasis wisata religi. Analisis terhadap dokumen APBDes dan wawancara

dengan aparaturnya dapat memberikan gambaran sejauh mana dukungan fiskal ini telah berjalan secara efisien.

Dengan mengoperasionalkan keempat konsep tersebut, peneliti dapat secara sistematis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan desa wisata religi Nyatnyono. Pendekatan ini juga menunjang dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Kajian ini bermetode kualitatif, penulis mengadopsi deskriptif sebagai pendekatannya. Kajian kualitatif searah pandangan Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2016) sebagai pedoman dalam menelaah guna memperoleh data deskriptif yang berbentuk perkataan secara terucap ataupun ditulis oleh individu juga pengamatan sebuah perilaku. Kajian jenis ini berupaya mendeskripsi semua kondisi ataupun gejalanya yang ditemui, berupa kondisi gejala sesuai keempirisan selama dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan sekaligus menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata berbasis religi Nyatnyono serta menganalisis faktor pendukung beserta penghambat yang memengaruhi Pemerintah Desa Nyatnyono dalam pengembangan tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Hal ini merupakan sebuah latar di mana penulis menangkap kondisi empiris atas objek kajiannya guna mendapat informasi ataupun pendataan sesuai keperluan. Situs di kajian berikut peneliti laksanakan pada Desa Nyatnyono.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penulis pilih sesuai tema yang dikaji. Maka, peneliti menentukan subjek penelitiannya adalah pihak Pemerintah Desa Nyatnyono yang bersangkutan.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data di penelitian berdiri atas data kualitatif, kuantitatif, serta penggabungan di antaranya. Data kualitatif ialah data yang terkumpul berbentuk tulisan, gambar, dan perkataan. Penulis menjadikan data kualitatif dimana selayaknya instrumen (Sugiyono., 2015). Keempat klasifikasi data pada kajian kualitatif, yakni perkataan ataupun perbuatan, rujukan tertulis, pendataan statistik, serta foto (Moleong, 2016).

Penulis memanfaatkan jenis data berupa penelitian kualitatif deskriptif di mana merupakan cara menghimpun data berbentuk susunan perkataan, gambar, serta tidak berbentuk numerik.

1.8.5 Sumber Data

Pendapat Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2016) sumber data utama di kajian kualitatif yakni perkataan dan perbuatan, terlepas dari

keduanya yakni terdapat penambahan data penguat misal dokumentasi ataupun semacamnya. Terdapat kedua jenis sumber data:

1. Data Primer

Perolehan data secara langsung melalui cara tanya jawab kepada narasumber ataupun rujukan asli. Data primernya kajian ini penulis dapatkann dari cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Desa Nyatnyono terkait pengembangan pariwisata..

2. Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekundernya dari berita pada laman web, artikel, jurnal, dan bahan bacaan secara relevan atas hal yang dikaji. Di sisi lain juga melalui dokumen yang dipunyai oleh Pemerintan Desa terkait, seperti laporan penyelenggaran program kerja.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015) teknik pengumpulannya mampu dilaksanakan pada banyak setting, berbagai rujukan, serta macam upaya. Observasi, wawancara, pun dokumen adalah ketiga teknik untuk mengumpulkan data di kajian ini.

1. Observasi

Pengamatan penulis maksudkan guna mendekripsikan sesuatu yang hendak dipelajari pada penelitiannya, kegiatan yang sedang berlangsung, beserta subjek yang berkaitan. Penulis melaksanakan pengamatan langsung di Desa Wisata Nyatnyono. Observasinya

disertai analisis juga pencatatan semua hal berkenaan sektor wisata di Desa Nyatnyono.

2. Wawancara

Teknik ini dalam mengumpulkan data dilaksanakan penulis guna mengadakan studi pendahuluan dan menemui masalah-masalah yang perlu dikaji, pun jika penulis menghendaki sesuatu melalui respondennya secara melanjut. Penulis menjalankan tanya jawab tidak terstruktur dengan pedoman hanya memanfaatkan poin-poin tertentu yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait.

3. Dokumen

Adalah pencatatan kejadian yang telah ada yang berupa karya bersejarah, gambar, penulisan oleh individu (Sugiyono, 2013). Hal tersebut dijadikan penunjang atas penerapan teknik observasi juga tanya jawab di kajian kualitatif (Sugiyono., 2015). Penulis memanfaatkan foto bukti yang berkaitan dengan sektor wisata di Desa nyatnyono.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pendapat L. R. Gay menganalisis data di kajian kualitatif perlu ringkasan data ke dalam sebuah langkah yang sistematis juga mampu dipercaya. Di kajian berikut memanfaatkan metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) yakni tahap untuk menganalisis data kualitatif dijalankan dengan berturut-turut sampai selesai dan secara interaktif, dan

menjadikan kejenuhan pada data. Tahapan dalam penelitian penulis memanfaatkan:

1. Reduksi data, yakni peringkasan, memilah gagasan-gagasan inti, memberi fokus pada sesuatu yang krusial, serta menggali pola temanya. Dengan demikian data yang direduksikan mampu memberi penggambaran lugas sehingga memudahkan penulis ke tahapan mengumpulkan data setelahnya, dan mencarinya jika perlu.
2. Penyajian data, yaitu perolehan data selanjutnya akan teorganisasikan, dirancang pada pola keterkaitan jadi memudahkan pemahaman. Di kajian kualitatif, sajian datanya mampu dipaparkan pada bentukan flowchart, bagan, pengkategorian, penjabaran pendek, pun sebagainya (Sugiyono, 2013). Melalui sajian data, mampu mempermudah hal yang dibahas, memperkirakan hal yang dikerjakan setelahnya.
3. Kesimpulan, yaitu penemuan baru di mana belum terdapat di temuan ini, temuan dapat berbentuk penggambaran atau pendeskripsian obyek di mana tidak jelas sebelumnya.

Dari ketiga langkah analisis dan interpretasi data terkait, saling berhubungan dan saat mengadakan kajian dibutuhkan penhimpunan data dari tahapan observasi, tanya jawab, serta pendokumentasian. Kemudian dari data yang didapat tersebut direduksi atau diringkas melalui pemfokusan pada gagasan krusal sesuai topik yang diangkat. Selanjutnya, dari data reduksi data disajikan di bentuknya yang berupa tulisan bernarasi, terakhir membuat kesimpulan sesuai sesuai data dan informasi yang diperoleh.

1.8.8 Kualitas Data

Kajian ini berteknik triangulasi, sebagian pakar berargumen berkenaan konsep triangulasinya yakni memperbandingkan beberapa rujukan, metodologi, serta penteorian. Teknik tersebut sesuai pendapat Sugiyono (2013) mengatakan bahwasanya teknik triangulasi dimaknai menjadi teknik mengumpulkan data dengan pengombinasikan macam teknik dalam mengumpulkan data serta rujukan yang tersedia. Teknik ini tujuannya demi mengujikan keabsahan data di kajian kualitatif (Moleong, 2016)

1. Memperbandingkan pendataan dari observasi dan data dari wawancara.
2. Memperbandingkan hal-hal yang dinyatakan seseorang di muka umum terhadap apa yang dinyatakan dengan sifat pribadi.
3. Memperbandingkan atas hal yang dinyatakan individu-individu terkait kondisi kajian oleh apapun yang dikatakan terus menerus.
4. Memperbandingkan kondisi dengan pandangan individu-individu di beragam asumsi ataupun prespektif individu misal rakyat umum, pihak pemerintah, individu dengan pendidikan tinggi ataupun menengah, individu berada.
5. Memperbandingkan data tanya jawab terhadap isi sebuah dokumentasi yang relevan.

Di kajian penulis menerapkan triangulasi sumber. Penulis mengumpulkannya di banyak sumber data bereknik serupa yakni

berwawancara pada informan berkenaan peran pemerintah desa dalam pengembangan aksesibilitas desa wisata Nyatnyono.